

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam perkembangan perekonomian saat ini yang sedang mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat peranan Akuntan sangatlah dibutuhkan, dan juga ilmu Akuntansi sangatlah penting dan sangat berguna untuk menentukan sesuatu agar didalam menjalankan kegiatannya atau dalam melaksanakan proses kegiatannya tidak menimbulkan kecurigaan, kerugian, ataupun penyalahgunaan ekonomi khususnya dalam keuangan, terutama dalam menjalankan kegiatan kegiatan dan juga transaksi transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan, contohnya seperti pencatatan, pengelompokan, melaporkan, dan menginterpretasikan data dasar ekonomi dalam sebuah perusahaan maupun entitas lainnya. Fungsi utama dari Akuntansi didalam sebuah perusahaan maupun entitas lain adalah sebagai informasi berupa data data khususnya dalam fokus Keuangan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan sebuah organisasi ataupun perusahaan sehingga dapat melihat dan juga memaparkan Laporan Keuangan serta perubahan yang terjadi didalamnya.

Informasi keuangan sangatlah penting dibutuhkan bagi sebuah perusahaan atau entitas lainnya untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak pihak misalnya pemilik perusahaan ataupun investor investor guna menunjang kinerja suatu perusahaan dan juga pembangunan perekonomian secara menyeluruh. Laporan Keuangan yang sudah dibuat akan menjadi dasar berbagai keputusan yang hendak akan dibuat oleh seorang manajer dan ataupun manajemen. Pada dasarnya

Proses Akuntansi adalah pembuatan Laporan Keuangan dengan inputnya yaitu suatu transaksi yang nantinya menghasilkan output berupa Laporan Keuangan bagi suatu perusahaan maupun entitas lainnya yang dasar pembuatannya telah diatur oleh peraturan agar mudah dalam penyusunannya, mudah dipahami dan juga mudah dibandingkan dengan periode sebelumnya pada Laporan Keuangan yang dibuat, dan juga agar mudah dibandingkan dengan Laporan Keuangan dari perusahaan atau entitas lain yang sejenis.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha, Kecil, dan Menengah (UKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama,

dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas luasnya sebagai wujud keberpihakan kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). UKM merupakan salah satu dari sektor riil yang paling banyak dijalani oleh pengusaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan pengelolaannya yang tidak sulit dan juga mudah untuk dilakukan oleh pihak dari kalangan manapun serta tidak membutuhkan biaya yang besar.

Pelaksanaan akuntansi begitu penting bagi sebuah unit usaha, dimana penerapan akuntansi dapat menyajikan suatu pembukuan yang baik dan rapi, serta memudahkan untuk melakukan kerja sama dengan perbankan, selain dapat melihat keefektifan dan keefisienan usaha. Fungsi SAK ETAP pada UKM yaitu agar umkm memiliki Laporan Keuangan yang baik serta dapat mengetahui peningkatan atau penurunan pendapatan di setiap periode dan dapat mengontrol pola manajemen meski dengan karyawan yang seadanya.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, banyak berdiri bentuk-bentuk usaha baik yang berskala kecil, menengah sampai berskala besar. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) cukup fleksibel serta dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, dan mereka cukup terdiversifikasi serta memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Akuntansi merupakan kunci indikator kinerja usaha. Informasi yang

disediakan oleh catatan-catatan akuntansi berguna bagi pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan. Informasi-informasi tersebut memungkinkan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat mengidentifikasi dan memprediksi area-area permasalahan yang mungkin timbul, kemudian mengambil tindakan koreksi tepat waktu. Walaupun dampak dari diabaikannya pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat secara jelas, namun tanpa implementasi akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek yang cerah dapat menjadi bangkrut. Melalui penerapan akuntansi yang baik, diharapkan sebuah UKM dapat mengetahui bagaimana perkembangan dan kesehatan usahanya. berapa keuntungan yang diperoleh usahanya pada suatu periode tertentu.

Hal ini sangat penting agar pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat menilai secara pasti kinerja dan kesehatan usahanya. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada umumnya masih menerapkan akuntansi yang sederhana tanpa melihat standar akuntansi yang baik dan benar. Dan masalah akan timbul jika penerapan akuntansi tidak dilakukan secara baik dan benar, apalagi jika memang tidak ada penerapan akuntansi sama sekali. Sehingga akan membuat pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan menetapkan keputusan dengan cara memperkirakan tanpa memiliki dasar yang kuat untuk keputusannya tersebut.

Didalam pembuatan Laporan Keuangan yang benar tentunya akan ada Siklus pencatatan Akuntansi yang benar pula sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat dibuat Laporan Keuangan tersebut, menurut Akhmad Syafi'i Syakur (2015) Siklus Akuntansi adalah Tahapan tahapan proses data yang meliputi aktifitas pembuatan dokumen transaksi, pencatatan transaksi,

pengelompokan data, pengihitisan data dan pelaporan data yang terjadi selama satu periode atau 12 (dua belas) bulan. Adapun pendapat menurut Shepti Dwi Puteri (2016) Siklus Akuntansi adalah Suatu proses mengenali, mengukur, dan menghubungkan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan . Dengan demikian dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pengertian mengenai Siklus Akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi yang terjadi kemudian transaksi tersebut dicatat dalam buku jurnal, setelah itu transaksi tersebut yang telah dicatat dimasukkan atau diposting ke buku besar agar transaksi tersebut sesuai dengan post nya masing masing. Dari penjumlahan akun akun tersebut lalu dimasukkan kedalam buku neraca saldo yang berisikan saldo saldo akhir dari buku besar. Kemudian dari neraca saldo bisa langsung dibuat Laporan Keuangan. Sesuai dengan Kieso (2015) Siklus Akuntansi adalah :

“ 1). Mengidentifikasi dan mencatat transaksi yang terjadi, 2). Melakukan pencatatan ataupun penjurnalan dalam buku jurnal, 3). Melakukan pengelompokan dalam buku besar sesuai dengan post nya masing masing, 4). Melakukan penyusunan ayat jurnal yang perlu disesuaikan kembali, 5). Menyusun neraca saldo ayau jumlah akhir saldo dalam buku besar dan dalam jurnal penyesuaian, 6). Menyusun dan membuat Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, laporan Perubahan Modal, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan juga Catatan Atas Laporan Keuangan, 7). Melakukan jurnal penutup, melakukan jurnal penutup pasca penutupan dan melakukan jurnal pembalik ”.

Supaya Siklus Akuntansi dan pelaporannya baik maka pelaporannya pun dilakukan secara berkesinambungan setiap 12 (dua belas) bulan sekali, namun Laporan Keuangan tersebut bisa dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali tergantung kepada pemakai ataupun pengguna Laporan Keuangan tersebut. Dari pengertian diatas dapat diartikan Siklus Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan

pengidentifikasian dan pencatatan dan sampai akhirnya dapat tersusun atau terbuatnya laporan berupa Laporan Keuangan yang dibutuhkan oleh pemilik dan pengguna Laporan Keuangan. Kemudian dalam pembuatan Laporan Keuangan tersebut juga dikenal adanya standar dan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, standar akuntansi tersebut diperlukan dan harus dilaksanakan karena banyaknya Laporan Keuangan.

Jika tidak adanya standar atau aturan yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan maka perusahaan dapat saja menyajikan Laporan Keuangan yang mereka buat tersebut sesuai dengan kehendak mereka sendiri, hal itu tentu saja akan menjadi masalah bagi para pengguna karena akan menyulitkan untuk memahami Laporan Keuangan yang dibuat dikarenakan siklus dan akuntansinya pun tidak benar.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan salah satu petunjuk dalam prosedur akuntansi yang berisi perlakuan pencatatan, penyusunan, dan penyajian Laporan Keuangan, kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penyajian Laporan Keuangan, tujuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik sendiri yaitu untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah dalam pembuatan Laporan Keuangan.

Setiap jenis usaha manapun diharapkan memiliki Laporan Keuangan untuk menganalisis kinerja Laporan Keuangan yang berguna bagi pengguna Laporan Keuangan dalam rangka membuat keputusan keputusan ataupun pengambilan

kebijakan ekonomi serta juga menunjukkan tanggungjawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Salah satu penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU RI No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah bahwa Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Berdasarkan data tentang kontribusi UKM di Indonesia yang di akses di www.dekop.id menjelaskan bahwa kontribusi sektor usaha kecil dan menengah terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat pada tahun 2017 sampai pada tahun 2018 sebanyak Rp. 753.612,8 Milyar atau 9,64%. Serapan tenaga kerja juga meningkat pada tahun 2017 sebanyak 116.431.224 orang, tahun 2018 sebanyak 116.978.631 orang.

Kontribusi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menurut data dari kementerian koperasi dan UMKM (Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah) yang didasarkan pada perhitungan BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2018 yaitu untuk produk domestik bruto sebesar 61,07% dan tenaga kerja sebesar 97,00%. Dari data tersebut terbukti bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja dan mampu meningkatkan dan juga mengemabngkan perekonomian di negara Indonesia. Semakin berkembangnya usaha, manentukan Usaha Kecil dan

Menengah (UKM) untuk berhubungan dengan pihak eksternal usahanya, misalnya untuk meningkatkan pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan berhubungan dengan pihak Bank/ Lembaga Keuangan lainnya, pihak Bank/ Lembaga Keuangan lainnya biasanya akan mensyaratkan Laporan Keuangan untuk menilai kelayakan usaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) nya tersebut, demikian ketika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sudah menjalankan kegiatan usahanya dalam satu periode. Dengan demikian semakin berkembangnya usaha menuntut Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk menyediakan Laporan Keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan standar ataupun aturan yang berlaku pada saat dibuat Laporan Keuangan tersebut, seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Elisabeth, dkk (2017) membuktikan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengalami kendala kendala dalam usahanya salah satunya yaitu permasalahan pencatatan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan aturan akuntansi yang berlaku yang biasanya digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Peraku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak atau belum melakukan penerapan akuntansi sesuai dengan standar. Sebagian dari mereka hanya melakukan pencatatan dan penghitungan dan selisih uang masuk dan uang keluar. Hal yang terpenting bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah cara menghasilkan laba atau keuntungan yang banyak tanpa repot melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seringkali dalam usaha skala kecil menengah menilai usaha bagus jika pendapatan sekarang lebih besar dari pendapatan tahun sebelumnya (laba/ keuntungan meningkat). Padahal

indikator keberhasilan dari sebuah usaha bukan hanya dinilai dari besar kecilnya pendapatan atau pun labanya, diperlukannya akuntansi yang akan menyusun Laporan Keuangan untuk menganalisis kinerja keuangannya.

Hasil penelitian Alfitri, dkk (2016) menunjukkan bahwa banyak pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak melakukan pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pentingnya pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan belum dipahami oleh para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Padahal dengan adanya pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan itu sangatlah penting bagi pelaku usaha untuk mengetahui kinerja perusahaan, perputaran, dan posisi dana, informasi perhitungan pajak dan memudahkan kerjasama yang terkait keuangan ketika akan melakukan penambahan modal dengan peminjaman di lembaga keuangan (Bank)/ lembaga keuangan lainnya atau badan pemberian penambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Permasalahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah pengelola keuangan dan permodalan dimana UKM masih menghadapi kendala yang cukup sulit dan serius, fenomena yang terjadi dalam menghadapi masalah permodalan dan sedikitnya para investor bersedia menanamkan atau meminjamkan modalnya kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) walaupun menghasilkan laba atau keuntungan yang besar. Alasan mendasar para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut adalah tidak menunjukkan bukti operasional dan keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk Laporan Keuangan. Menurut Krisdiartiwi (2015:1) selama ini pembukuan atau pun penyusunan sering dianggap rumit dan

kurang begitu penting dalam membangun suatu bisnis, padahal bagi sebuah perusahaan pembukuan sangatlah diperlukan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, tak hanya bagi perusahaannya namun juga mutlak diperlukan bagi para usaha kecil dan menengah (UKM).

Sama halnya dengan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mitra binaan PT. Biofarma (Persero), para Usaha Kecil dan Menengah (UKM) binaan tersebut terkendala atau memiliki masalah dalam pengelolaan keuangan dan permodalan, dimana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) binaan tersebut masih memiliki kendala yang cukup serius, maka dengan itu para investor enggan memberikan pinjaman kepada para Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena para UKM tersebut tidak menunjukan bukti operasional dan bukti keuntungan perusahaan dalam sebuah Laporan Keuangan, dengan demikian para investor tidak akan percaya memberikan permodalan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Alasan mengapa para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mitra binaan PT. Biofama (Persero) tidak menyusun dan membuat bukti laporan operasional dan laporan keuntungan usahanya yang berbentuk Laporan Keuangan adalah karena menurut para pelaku usahanya tersebut pembuatan Laporan Keuangan adalah suatu yang rumit dan beranggapan Laporan Keuangan tersebut sangatlah tidak penting, bagi mereka yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan yang besar dengan beban yang kecil di setiap harinya. Menurut Warsono (2019) menjelaskan bahwa akuntansi adalah

“ Dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UKM dapat memenuhi syarat dalam pengajuan Kredit, seperti Laporan Keuangan, namun pelaksanaan pembukuan tersebut merupakan suatu hal yang amatlah sangat sulit dilakukan karena penyusunan dan pembuatannya dianggap rumit dan

para pelaku UKM tersebut memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi dalam penyusunan laporan kegiatan operasional berbentuk Laporan Keuangan apalagi laporan operasional yang dibuat harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bagi mereka yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan usaha dari hari ke hari ”.

Dengan demikian menurut kutipan diatas para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memang jarang atau tidak sama sekali membuat laporan kegiatan operasional dalam bentuk Laporan Keuangan, begitu pula dengan para pelaku usaka Kecil dan Menengah mitra binaan PT. Biofarma (Persero), mereka ada yang membuat dan juga ada yang tidak membuat Laporan Keuangan karena dirasa sangatlah tidak penting bagi mereka untuk kemajuan usahanya dan rumit dalam pembuatannya, padahal Laporan Keuangan tersebut sangatlah penting bagi para investor dan pemberi pinjaman/ dana keuangan kepada UKM tersebut, jika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mitra binaan tersebut tidak memiliki laporan operasional dalam bentuk Laporan Keuangan maka PT. Biofarma (Persero) pun mungkin tidak akan memberikan pinjaman dana lagi kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) karena tidak adanya bukti bahwa uang atau dana yang telah diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut itu digunakan untuk kemajuan usahanya.

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan oleh manajemen kepada pihak eksternal maupun internal. Melihat pentingnya dari segi kegunaan, Laporan Keuangan harus disusun berdasarkan standar yang berlaku agar dapat diinterpretasikan dengan konsep dan pemahaman yang sama oleh para penggunanya. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum cukup menyulitkan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)

yang hanya berpengetahuan akuntansi minim dalam menyusun Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) hadir dengan tujuan untuk mengakomodir kebutuhan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam penyelenggaraan usahanya seperti UKM. Penyajian Laporan Keuangan yang baik adalah laporan yang bermanfaat bagi pihak internal perusahaan dan juga Laporan Keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai macam kemudahan untuk perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah bisa memilih standar akuntansi yang akan dipakai dan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Namun bagaimanapun para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mitra binaan pun haruslah menyusun Laporan Keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban atas modal yang diberikan dan juga sebagai bukti tertulis atas kegiatan operasionalnya, begitupula dengan PT. Biofarma (Persero) sebagai pemberi pinjaman haruslah mendapatkan bukti operasional atas dana yang telah diberikan dalam bentuk Laporan Keuangan dari para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mitra binaannya untuk bahan analisis dan pertimbangan pemberian kredit kembali. Selain itu juga di sisi lainnya bahwa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga mewajibkan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang bertujuan untuk pertanggungjawaban kepada pemberi pinjaman dana dan pertanggungjawaban kepada negara melalui pembayaran pajak.

Dengan pernyataan dari Ikatan Akuntan Indonesia dan PT. Biofarma (Persero) sebagai pemberi pinjaman dana kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), maka dengan itu para pelaku usaha khususnya para pelaku UKM mitra binaan PT. Biofarma (Persero) haruslah membuat bukti operasional usahanya dalam bentuk Laporan Keuangan yang baik dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini bagi para Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain itu Laporan Keuangan yang dibuat pun sangatlah berguna bagi para pelaku UKM karena dengan membuat Laporan Keuangan yang baik dan benar pula maka para Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini pun dapat dengan mudah melihat bagaimana kondisi keuangan pada usahanya tersebut serta dapat mengetahui keuntungan yang diperoleh dari target penjualan pada usahanya tersebut.

Adanya Laporan Keuangan membuat pihak luar dapat menganalisis kelayakan pemberian kredit atas permohonan yang diajukan, laporan keuangan yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya akan sangat membantu dalam proses evaluasi kelayakan kredit, namun sebagian besar Usaha Kecil dan Menengah (UKM) belum mampu menyediakan informasi keuangan dengan benar dan teratur sehingga mereka mengalami kendala pengajuan kredit pada lembaga formal seperti perbankan. Semua pihak menyadari pentingnya Akuntansi dalam sebuah bisnis tetapi UKM tidak dapat mengetahui prestasi kerja dan kesulitan dalam pengajuan kredit ke lembaga formal. Kita tidak bisa menyalahkan UKM yang selalu tidak mau melakukan pembukuan transaksi dan bervariasi pelaporan dengan keuangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), karena pada PSAK Umum terlalu rumit pada sektor usaha kecil dan menengah, namun Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ini akan membantu perusahaan kecil dan juga pra pelaku Usaha kecil dan menengah dalam penyediaan Laporan Keuangan yang tetap relevan dan andal. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sangatlah memberikan banyak sekali kemudahan untuk para pelaku usaha kecil dan menengah dibandingkan dengan penggunaan PSAK Umum dalam pembuatan laporan keuangan, perbedaannya secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang hanya sekitar 100 (seratus) halaman dengan penyajian 30 bab.

Pada perusahaan PT. Biofarma (Persero) khususnya di bagian kemitraan memiliki UKM binaan dimana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut bergerak dalam bidang usaha perdagangan, industri, perternakan, perkebunan, pertanian, kerajinan ,dan jasa. Usaha kecil dan menengah yang dibina tersebut mendapatkan sejumlah uang dan atau barang untuk menembah permodalan usahanya dari PT. Biofarma , dana yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) binaan tersebut itu berasal dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang di ambil sebesar 2% dari keuntungan perusahaan, setelah penyisihan laba sebesar 2% untuk dana CSR lalu dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dengan dua cara yaitu melalui program bina lingkungan dan juga program kemitraan, bagian kemitraan disinilah dana CSR itu disalurkan kepada para pelaku usaha UKM. Dana yang di ajukan kepada PT. Biofarma sangatlah bervariasi mulai dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Program CSR (Corporate Social Responsibility)

merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang baru.

Setelah melakukan penyaluran dana oleh PT. Biofarma (persero) juga melakukan monitoring terhadap jalannya bisnis yang dilakukan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mitra binaannya tersebut dengan survei langsung ke lapangan melihat bagaimana usahanya itu berjalan, setiap survei lapangan pun tidak lupa juga PT. Biofarma selaku kreditor memberikan masukan mengenai kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mitra binaannya tersebut.

Namun seringkali pada saat survei ke Usaha Kecil dan Menengah (UKM) jika ditanya laporan usahanya seperti Laporan Keuangan, pemasukan dan pengeluaran UKM tersebut tidak memiliki laporan apapun dikarenakan tidak mengetahui tatacara pencatatan akuntansi dari mulai terjadinya transaksi hingga penyusunan dan pembuatan Laporan Keuangan padahal PT. Biofarma ini sudah melakukan pembinaan dan pelatihan bagaimana penyusunan dari awal terjadinya transaksi hingga Laporan Keuangan di buat. PT. Biofarma (Persero) membina para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mitranya dengan melibatkan praktisi langsung dari IAI dan pembinaan tersebut PT. Biofarma tersebut selaku kreditor menginginkan penggunaan proses akuntansi sampai dengan jadinya Laporan Keuangan tersebut menggunakan standar akuntansi untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dikarenakan standar tersebut menggunakan prinsip kesederhanaan dan dirasa tidak akan menyulitkan para pelaku Usaha Kecil

dan Menengah (UKM) mitra binaannya. PT. Biofarma sendiri disini hanya menginginkan laporan usahanya tersebut dengan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Disisi lain pun IAI membolehkan para pelaku UKM menggunakan Standar Akuntansi Keuangan ETAP sebelum SAK UMKM, dikarenakan jika UKM ingin menggunakan SAK EMKM haruslah menggunakan SAK ETAP kurang lebih selama 2 tahun sesuai dengan aturan yang dibuat oleh IAI, menurut Warren (2016) Akuntansi bermanfaat untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berfungsi sebagai sumber informasi yang utama dan akan menjadi sumber dasar dalam pengambilan keputusan pada usahanya.

Pada sisi lain PT. Biofarma (Persero) sangatlah membutuhkan Laporan Keuangan dari para mitranya, namun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) daripada mitranya tersebut belum bisa membuat Laporan Keuangan yang akan digunakan untuk analisis analisis bagian kemitraan di PT. Biofarma, misalnya seperti apakah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) itu sudah tidak sanggup lagi membayar cicilan utang pada bagian kemitraan PT. Biofarma, apakah layak tidaknya diberikan pinjaman kembali kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) , dan lain lain. PT. Biofarma pun telah mengadakan pelatihan bagi para mitranya untuk pembuatan Laporan Keuangan, dan disisi lain pun Usaha Kecil dan Menengah (UKM) haruslah membuat laporang yang diwajibkan PT. Biofarma sebagai laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah di beri sebagaimana yang telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan. Untuk mempermudah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan penyusunan

Laporan Keuangan, maka pada tanggal 17 Mei 2009 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan standar akuntansi khusus untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan disahkan pada tanggal 19 Juli 2009 oleh DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) dan setelah dilakukan pengesahan itu kemudian dilakukan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menyusun Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ini dikenal dengan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2011.

Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang diperuntukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) disusun dan diterbitkan untuk menjadi pedoman atau acuan menyusun Laporan Keuangan untuk para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Entitas yang dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan yang menerbitkan Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Pada dasarnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ini tidak akan menyusahkan dalam pembuatan laporan keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia pun menerbitkan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Dengan Akuntabilitas Publik (PSAK UMUM), PSAK UMUM

adalah Standar Akuntansi Keuangan yang diperuntukan bagi entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan, PSAK UMUM disusun dan diterbitkan untuk menjadi pedoman atau acuan pada Laporan Keuangan bagi entitas atau perusahaan yang sudah GoPublik. Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan UMUM antara lain:

- 1) Pada penyajian Laporan Keuangan tidak menyajikan aset keuangan, investasi property berdasarkan nilai wajar, aset biologis diukur dengan harga perolehan dan nilai wajar, kewajiban jangka panjang yang ada bunganya, aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan, serta controlling interest.
- 2) Pada penyajian laporan laba rugi, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menggunakan judul laporan laba rugi, sedangkan pada SAK umum menggunakan judul laporan laba rugi komprehensif. Karena didalam laporan laba rugi tersebut terdapat laporan laba rugi dari anak entitasnya.
- 3) Dalam catatan atas Laporan Keuangan perbedaannya terletak pada pengungkapan modal Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Sama dengan pengungkapan SAK umum karena modal yang diatur dalam PSAK umum ialah gabungan dengan anak entitasnya.
- 4) Laporan arus kas pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) arus kas aktifitas operasi menggunakan

metode langsung dan tidak mengatur arus kas mata uang asing. Karena penggunaan laporan ini hanya untuk pemilik usahanya saja.

- 5) Tidak adanya peraturan mengenai Laporan Keuangan konsolidasi dan terpisah dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) . Karena standar ini yang digunakan dipara pelaku tidak perlu digabungkan (Konsolidasi) beda halnya dengan PSAK umum yaitu harus dilakukan secara komprehensif Laporan Keuangan yang dibuatnya sehingga perlu diadakan konsolidasi.
- 6) Mengenai kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)antara lain pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, konsistensi perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi serta tidak adanya kesalahan mendasar dan laba luar biasa
- 7) Dalam instrumen keuangan dasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ruang lingkupnya adalah investasi pada efek tertentu, serta klasifikasi trading, held to maturity dan available for sale, namun jika PSAK ETAP ini digunakan oleh entitas tertutup maka ruang lingkupnya pun menyesuaikan.
- 8) Investasi pada perusahaan asosiasi anak dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)menjelaskan bahwa ruang lingkupnya adalah asosiasi dan entitas anak, menggunakan metode akuntansinya adalah metode biaya untuk entitas dan metode permodalan untuk entitas anak.

- 9) Metode yang digunakan dalam property investasi pada SAK ETAP adalah metode biaya sedangkan SAK Umum menggunakan metode nilai wajar dikarenakan mengikuti harga yang sesungguhnya pada saat dilakukan penilaian oleh seorang appraisal, dan juga harus menunjukkan nilai kekayaan dengan nilai sebenar benarnya.
- 10) Aset tetap pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tidak menggunakan pendekatan komponenisasi, revaluasi dapat dilakukan jika sesuai dengan peraturan pemerintah, tidak perlu meriview nilai sisa.
- 11) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tidak mengizinkan pengakuan post post dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah post post tersebut merupakan hasil dari penerapan “matching concept”.
- 12) Saling hapus tidak di perkenankan asat aset dan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan prinsip kesederhanaan dapat memberikan kemudahan bagi UKM dalam penyajian Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan ETAP diharapkan memberikan kebebasan berbisnis, kebebasan berinvestasi, dan membangun ekonomi kerakyatan berbasis UKM bagi Indonesia. Dengan pengaplikasian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) juga memberikan kemudahan untuk perusahaan dibandingkan

dengan PSAK Umum/ SAK UMUM dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks, namun pada kenyataannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) masih belum banyak diterapkan oleh para pelaku UKM dalam menyusun Laporan Keuangan di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak UKM yang belum menerapkan atau melakukan pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Hal tersebut terjadi karena kurang luasnya sosialisasi tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi para pelaku UKM dalam melakukan pencatatan sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan, selain itu juga terdapat kendala-kendala lain bagi pelaku usaha dalam melakukan pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam membuat atau menyusun Laporan Keuangan yang baik dan benar sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Seperti halnya UKM mitra binaan PT. Biofarma (persero) belum sepenuhnya menyusun Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perhitungan arus kas, perhitungan perubahan modal dan catatan atas Laporan Keuangan, dan juga pada laporan laba rugi pembuatannya sangatlah sederhana, artinya penyusunan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) belum diimplementasikan secara

penuh. Sedangkan Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2018:3:12) meliputi Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas. Hal ini menimbulkan penulis untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada usaha kecil dan menengah (UKM) mitra binaan PT. Biofarma (persero).

Pencatatan keuangan yang dilakukan, pandangan tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk membantu dan memudahkan pelaku usaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut dalam melakukan pencatatan dan penyusunannya. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat membantu dan mengevaluasi usahanya oleh pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan dapat dijadikan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya, Seperti menambah modal dengan melakukan peminjaman ke Bank atau lembaga keuangan lainnya dan juga digunakan yang terkait dengan pajak. Akuntabilitas yang baik dan benar akan membawa dampak positif bagi perusahaan maupun entitas lain untuk memperoleh kepercayaan pelanggan, semakin banyak perusahaan itu atau entitas lain itu mendapatkan pelanggan maka akan semakin meningkat pula hasil penjualannya dan juga akan semakin banyak permodalan dari pertambahan laba.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang sudah dijelaskan dan juga telah disajikan diatas tersebut, dan juga Melihat fenomena bahwa Laporan Keuangan yang disusun oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak sepenuhnya

berdasarkan standar dan juga prinsip akuntansi yang sebenarnya dalam penyusunan Laporan Keuangannya, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dari fenomena fenomena tersebut dengan judul “ **Analisis Proses Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Kecil Dan Menengah Mitra Binaan PT. Biofarma (Persero)**, Studi Kasus pada PT. Biofarma (Persero) Kota Bandung, Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan fenomena dari Latar Belakang diatas maka penulis ingin melakukan penelitian secara rinci dan terstruktur yang di rangkum dalam Identifikasi Masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penyusunan dan pembuatan Laporan Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) binaan PT. Biofarma.
- 2) Bagaimana kesesuaian penerapan proses akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) binaan.
- 3) Bagaimana kesesuaiann proses akuntansi usaha kecil dan menengah (UKM) binaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku.
- 4) Apa saja faktor faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya proses akuntansi berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada usaha kecil dan menengah (UKM) mitra binaan PT. Biofarma (Persero).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang sudah dijelaskan diatas tersebut, maka dengan demikian ini maksud dan juga tujuan dari penelitian yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana peran para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mitra binaan PT. Biofarma dalam proses akuntansi dalam menyusun Laporan Keuangan dari awal mula terjadinya transaksi hingga menjadi ataupun tersusun sebuah laporan operaional berupa Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Dan juga mengetahui kendala apa saja yang membuat para Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut tidak membuat Laporan Keuangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan maksud dari penelitian tersebut yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Untuk membantu para pelaku bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam memahami peran atau fungsi dan peranan akuntansi dalam penyajian Laporan Keuangan yang baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada aktifitas bisnisnya.
- 2) Mengukur dan juga menganalisis sejauh mana para pelaku usaha dalam menerapkan proses akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang

dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan juga penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh para Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

- 3) Untuk mengetahui bentuk dari Laporan Keuangan para Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan juga apa yang selama ini menjadi acuan atau dasar dalam pembuatan Laporan Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- 4) Penelitian ini juga dapat bertujuan untuk ikut mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Usaha Kecil dan Menengah sebagai wujud nyata yang berkaitan dengan dunia perguruan tinggi dalam aspek pengabdian terhadap masyarakat khususnya Usaha Kecil dan Menengah dalam dunia praktik.
- 5) Untuk mengsosialisasikan bahwa adanya Standar Akuntansi Keuangan untuk para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- 6) Dan juga mengedukasi atau melatih para Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memahami bagaimana proses akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang akan diuraikan dalam sub sub bab dan terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- 1) Bagi Peneliti : Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan sesuai dengan topik dan sebagai salah satu sarana serta memberikan motivasi bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama studi di perkuliahan.
- 2) Bagi Pengembangan Bidang Keilmuan : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan karena dalam penelitian ini terdapat sumber sumber yang akuntabel, masukan dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang hampir sama dan lebih lanjut lagi dan lebih baik lagi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Perusahaan dan usaha kecil dan menengah (UKM): Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya dalam hal pembinaan akuntansi pada usaha kecil dan menengah (UKM) dalam hal pelaporan keuangan dari awal proses hingga menjadi Laporan Keuangan dan sebagai sumbangan pemikiran dalam pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh perusahaan yang berkaitan dengan arus informasi keuangan guna menunjang kelangsungan hidup para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
- 2) Bagi Penulis : Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan atas apa yang telah dituliskan diharapkan mampu memberikan informasi tentang bagaimana mengenai proses akuntansi sampai dengan pembuatan dan juga penyajian Laporan Keuangan yang baik

dan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi para pemakai yang sesuai.

- 3) Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum : Diharapkan penelitian ini dapat memberikan penambahan wawasan bagi pembaca dan juga menyediakan informasi tentang proses akuntansi yang benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku khususnya bagi para pelaku usaha bagaimana penerapan proses akuntansi sampai pembuatan Laporan Keuangan.
- 4) Bagi Civitas Akademik : Diharapkan penelitian ini dapat menambah studi kepustakaan mengenai masalah Usaha Kecil dan Menengah dalam menghadapi proses akuntansi yang benar sampai dengan penyajian Laporan Keuangan yang baik dan benar pula.
- 5) Bagi IKOPIN : Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan juga sebagai pembendaharaan referensi jurnal skripsi khususnya bidang ilmu akuntansi yang berkaitan dengan evaluasi perkembangan dan juga berguna untuk masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan : Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian , kegunaan penelitian dan manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori : Pada bab ini akan dibahas mengenai teori teori yang berkaitan dengan topik dan juga berisikan metode penelitan yang digunakan.

Bab III Gambaran Umum : Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum perusahaan yang menjadi objek penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Pada bab ini akan membahas mengenai identitas informan, dan juga membahas yang telah menjadi identifikasi masalah dalam penelitian kali ini.

Bab V Penutup : Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan penelitian dan juga saran saran yang diajukan dalam penelitian kali ini.



IKOPIN